

**PANCASILA
ETIKA BANGSA INDONESIA
BERHADAPAN DENGAN
OTORITARIANISME**

Kalau kita mau mengerti mengapa Pancasila begitu penting bagi Indonesia, kita harus mempertanyakan fungsinya. Bung Karno melontarkan Pancasila bukan sekedar sebagai cita-cita filosofis bagus. Melainkan untuk memecahkan sebuah masalah yang serius, yang kalau tidak dipecahkan akan menggagalkan persatuan Indonesia. Yaitu pertanyaan apakah Indonesia harus didasarkan atas aturan sebuah agama atau menjadi negara kebangsaan sekuler?

Mengapa pertanyaan ini bisa muncul? Karena komunitas-komunitas etnik, budaya dan agama yang mau mewujudkan Indonesia begitu majemuk. Kebangsaan Polandia, atau Korea, atau Kamboja sudah jelas: Masyarakat negara-

negara itu dipersatukan oleh satu bahasa dan satu budaya. Kebangsaan tiga negara itu adalah kebangsaan *alami*. Tetapi kebangsaan Indonesia bukan alami, melainkan *etis*: meskipun secara alami majemuk, namun komunitas-komunitas Indonesia bertekad etis menjadi satu bangsa karena bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan, keadilan dan kemajuan. Atau, dalam rumusan lain: Tekad untuk memerdekakan diri dari penjajahan membuat komunitas-komunitas Nusantara, meski berbeda secara etnik, budaya dan agama, menyadari: Kita satu bangsa, bangsa Indonesia.

Tekad itu secara mengagumkan dinyatakan dalam Sumpah Pemuda di mana ratusan pemuda dari seluruh Nusantara bersama-sama menyatakan tekad mereka untuk memperjuangkan satu tanah, satu bangsa, dengan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami yang banyak dengan pelbagai latar belakang adalah bangsa Indonesia.

Tetapi ada satu syarat yang mutlak harus terpenuhi kalau komunitas-komunitas berbeda itu betul-betul mau bersatu. Yaitu kesediaan untuk saling menerima dan saling mengakui dalam kekhasan masing-masing. Sehingga orang Jawa tidak perlu kurang Jawa, dan orang Minang tidak perlu kurang Minang dengan menjadi Indonesia. Orang Katolik tidak perlu kurang Katolik dan orang Islam tidak perlu membatasi ke-Islamannya dengan menjadi Indonesia. Sebaliknya, apabila negara didasarkan pada bahasa atau agama tertentu, biasanya bahasa dan agama mayoritas, persatuan

bangsa akan gagal karena merupakan persatuan yang dipaksakan, persatuan suatu dominasi, suatu penindasan baru. Contoh-contoh ada banyak (dan membuktikan kehebatan wawasan para pendiri negara Indonesia), misalnya Myanmar atau India - di mana sesudah puluhan tahun keterbukaan partai pemerintah PBJ [Partai Bharatiya Janata] di bawah PM Modi mencoba membuat agama menjadi tanda dan syarat kebangsaan India.

Apakah Indonesia dijadikan negara kebangsaan sekuler (seperti India di bawah P. M. Pandit Nehru dan Partai Congress)? Tetapi bangsa Indonesia bukan bangsa sekuler, di mana agama adalah urusan pribadi. Melainkan bangsa Indonesia seara mendalam relijius, berketuhanan. Tetapi Indonesia juga tidak dapat didasarkan atas satu agama – tentu itu agama mayoritas besar, agama Islam - karena lantas yang lain-lain menjadi warga negara kelas dua, sehingga persatuan bangsa menjadi rapuh.

FUNGSI PANCASILA SEBAGAI DASAR (PERSATUAN) NEGARA INDONESIA

Dalam situasi ini pernyataan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI menunjukkan jalan ke masa depan bersatu: Indonesia bukan negara (atas dasar satu) agama, Indonesia bukan negara kebangsaan sekuler, melainkan Indonesia mendasarkan diri pada lima sila yang dimiliki bersama: Indonesia adalah negara Pancasila. Pida-

to Bung Karno diterima dengan tepuk tangan oleh seluruh anggota BPUPKI. Kemudian mereka duduk bersama untuk memberikan rumusan yang paling tepat bagi Pancasila, dalam rangka persiapan undang-undang dasar bagi Indonesia yang mau diproklamasikan kemerdekaannya. Sebuah Panitia Sembilan memberi rumusan kepada lima sila Pancasila yang kemudian juga disetujui oleh BPUPKI dalam sidangnya bulan Juli. Dan akhirnya Pancasila mendapat bentuk resmi definitif pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, dalam Pengantar Undang-undang Dasar yang disahkan oleh PPKI.

Pancasila adalah nilai-nilai, cita-cita, dan tolok ukur etika perpolitikan Indonesia

PANCASILA MEMECAHKAN MASALAH IDENTITAS

Dalam negara-negara seperti Korea atau Polandia masalah identitas - semula - tidak muncul karena identitas nasional sama dengan identitas budaya dan etnik (catatan: negara dengan identitas budaya/etnik seragam sekarang dalam kesulitan menampung pendatang/migran/pengungsi: bagaimana dapat diintegrasikan). Akan tetapi kebanyakan negara di dunia secara budaya, etnik, sering juga secara agama, tidak seragam. Lalu identitas nasional diambil dari mana? Bahasa nasional diambil dari mana? Bahasa Tagalog di Philipina hanya bahasa ibu kurang dari seperempat orang Philipina. Di India bahasa Hindi tidak disukai oleh orang In-

dia etnik Tamil atau Dravida. Myanmar menetapkan identitas Birma (Bama) sebagai identitas nasional. Tapi orang Birma hanya 6 persen dari penduduk Myanmar. Maka sejak kemerdekaannya 1946 terus suku-suku non-Birma berontak. Membuat bahasa mayoritas menjadi bahasa nasional bermasalah besar. Begitu misalnya juga di Sri Langka.

Tetapi dengan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia, identitas-identitas ratusan komunitas etnik, budaya dan agamis se-Nusantara tidak ditekan dan diancam, melainkan justru dilindungi dan diangkat. Di Indonesia orang Indonesia bangga bahwa dia orang Bugis, orang Minang, orang Jawa, justru sebagai orang Indonesia. Orang Islam Indonesia tak perlu memotong apa pun dari keislamannya dengan menjadi Indonesia. Orang Katolik bisa 100% Katolik dan 100% Indonesia. Oleh karena itu persatuan Indonesia begitu kuat. Jati diri bangsa mendukung jati diri masing-masing komunitas, dan jati diri masing-masing komunitas mendukung jati diri Indonesia.

Perkenalkan saya fokus sebentar pada dua dari sila Pancasila

SILA PERTAMA

Ada unsur yang penting sekali terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 itu: Dalam rumusan Pancasila yang disepakati oleh Panitia Sembilan dan dipertahankan oleh BPUPKI

dalam perundingan mereka bulan Juli sila pertama, "Ketuhanan", diberi tambahan "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Atas permintaan Mohammad Hatta di pagi tanggal 18 itu lima wakil Islam dalam PPKI menyetujui bahwa tujuh kata itu tidak dimasukkan ke dalam Pancasila (dan UUD 1945), dan bahwa sila pertama diberi rumus "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan pertimbangan: Kalau dalam teks paling dasar bangsa Indonesia satu agama disebut khusus, dengan sendirinya agama-agama lain akan merasa sebagai bagian bangsa kelas dua dan persatuan Indonesia - syarat paling kunci bagi bangsa yang terdiri atas kemajemukan komunitas - mesti terancam.

Rumus final itu begitu mengesankan karena menunjukkan kesediaan para tokoh agama mayoritas terbesar, agama Islam, untuk tidak minta kedudukan khusus dalam Undang-undang Dasar. Indonesia itu Indonesia milik semua. Itu juga dicerminkan oleh fakta bahwa dalam seluruh UUD 1945, termasuk penjelasannya, dipertahankan suatu bahasa yang tidak berdasarkan satu agama saja; UUD 1945 betul-betul undang-undang dasar bagi semua.

Rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" di satu pihak jelas-jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara religius, tetapi sekaligus menampung semua pewujudan religiositas, bukan hanya pewujudan religiositas satu agama. Dapat dicatat di sini: Betapa luar biasa Pancasila itu keli-

hatan kalau kita membandingkan Indonesia dengan begitu banyak negara lain di dunia yang juga majemuk, tetapi yang - kelihatan dari sejarah konflik-konflik internal sampai sekarang - tidak berhasil mewujudkan kebangsaan yang menampung seluruh kemajemukan etnik dan religius mereka masing-masing.

Mengapa Pancasila dapat menjalankan fungsinya sebagai pemersatu itu dengan begitu gemilang? Karena kekuatan Pancasila berdasarkan dua kenyataan: Di satu pihak Pancasila berakar dalam nilai-nilai tradisi-tradisi Indonesia, di lain pihak Pancasila mewujudkan pokok-pokok etika politik yang terbuka bagi dunia pasca-tradisional paling modern.

SILA KELIMA

Akan tetapi, barangkali sila kelima masih lebih kunci daripada sila pertama. Yaitu pewujudan *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Fakta bahwa 50% masyarakat Indonesia belum betul-betul sejahtera, dan bahwa 10%, sekitar 28 juta orang, masih hidup dalam kemiskinan, sementara orang kaya kita semakin mewah, merupakan tantangan serius. Jangan-jangan Indonesia terpecah secara vertikal. Apabila orang kecil mendapat kesan bahwa Indonesia adalah milik “mereka” yang di atas, kita jangan heran apabila mereka mencari orientasi ideologis lain daripada Pancasila.

Jadi amat perlu dapat membuat sejahtera seluruh masyarakat nyata-nyata mendapat prioritas. Tentu masyarakat terus bertanya: Kapan 50% berpendapatan rendah akan bisa merasakan bahwa *basic needs* mereka -sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan- betul-betul terjamin? Kekacauan BPJS -kita masih belum berhasil memberi jaminan dasar kesehatan kepada segenap warga, -tetapi juga skandal Jiwasraya daripadanya masa depan sekian orang kecil terasuransi tergantung- merupakan tantangan serius bagi pemerintah kita. Kalau masyarakat merasa ditangani secara adil bisa diharapkan bahwa radikalisme agama akan tetap merupakan gejala sampingan. Jadi kita, sesuai dengan sila kelima Pancasila harus membikin nyata solidaritas bangsa.

Di sini perkenankan saya memberi catatan. Yaitu hal ***korupsi***. Aduuh..., aduhhh.... Amat menyedihkan warisan masa kepresidenan Jokowi ini. Katanya Indonesia belum pernah sekorup sekarang. Korupsi berarti bahwa nurani sudah membusuk. Orang bahkan tak malu memamerkan kemewahannya. Bahwa di tahun-tahun terakhir elit politik sengaja memperlemah pemberantasan korupsi adalah modal buruk untuk masa depan Indonesia. Korupsi adalah tantangan paling serius yang kita hadapi. Karena korupsi membusukkan segala apa.

BERAKAR DALAM NILAI-NILAI TRADISI-TRADISI INDONESIA

Lima sila Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk karena bukan paham-paham impor dari luar, melainkan berakar dalam budaya-budaya Nusantara. Dengan cara masing-masing budaya-budaya itu sudah selalu memiliki nilai-nilai, sikap-sikap dan cita-cita yang dirumuskan dalam Pancasila. Di mana termasuk bahwa budaya-budaya Nusantara bukannya menutup diri, melainkan terbuka hal mana kelihatan dari cara agama-agama besar umat manusia dengan tentram dan halus masuk dan menjadi ciri budaya-budaya Indonesia sendiri. Indonesia bisa terbuka - tanpa kehilangan identitasnya.

Yang paling mencolok adalah keterbukaan multikultural komunitas-komunitas di wilayah yang akan menjadi Indonesia. Kemajemukan etnik, bahasa, budaya dan agama bagi mereka bukan masalah. Berbeda misalnya dengan kebanyakan orang Jerman, manusia Indonesia - sampai ke pelosok-pelosok - sudah biasa dengan kemajemukan. Orang Indonesia suka merantau, mereka bersentuhan, berkomunikasi dan berdagang dengan orang-orang yang berbahasa berbeda, yang adat berbeda dan orientasi agama berbeda. Mereka biasa dan tanpa kesulitan bisa saling menerima dalam kekhasan masing-masing, jadi dalam perbedaan. Hal mana masuk ke dalam masing-masing lima sila Pancasila.

Ketuhanan Yang Maha Esa berakar dalam kemampuan untuk menerima/mengakui bahwa saudara dekat bisa beragama dan berorientasi keagamaan lain. Meskipun kejadian intoleransi dalam tahun-tahun berakhir terus bertambah, namun sekarang pun di sebagian besar masyarakat kesediaan untuk saling menerima dalam perbedaan masih kuat.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berakar dalam kemampuan-kemampuan sosial seperti saling menghormati dan mengakui dalam perbedaan, kesadaran bahwa konflik-konflik yang muncul harus diselesaikan tanpa kekerasan dan secara beradab.

Persatuan Indonesia terwujud karena kesadaran yang muncul selama berabad pengalaman penjajahan, yaitu bahwa "kita meski berbeda adalah satu bangsa", bahwa penjajahan harus dipatahkan dan bahwa "kita harus membangun kebersamaan yang berdasarkan keadilan".

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengungkapkan kemampuan tradisional untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tidak melalui pola menang-kalah, melainkan dalam bicara bersama sampai kesepakatan tercapai.

Dan tekad para pendiri bangsa agar Indonesia "*mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" mencerminkan keyakinan mendalam manusia Indonesia bahwa hidup bersama harus adil, bahwa tidak ada yang bo-

leh diizinkan ketinggalan, bahwa "kita senasib sepenanggungan".

Tinjauan singkat ini memperlihatkan betapa nilai-nilai Pancasila bukan sekedar hasil pemikiran pintar, melainkan merupakan keutamaan-keutamaan sosial yang mendasari kehidupan bersama. Nah, yang semakin mengagumkan – mengagumkan kok Bung Karno seakan-akan secara spontan mampu merumuskan Pancasila - adalah bahwa lima sila Pancasila sekaligus terbuka terhadap keyakinan-keyakinan etika pasca-tradisional paling inti yang semakin diyakini dalam dunia "modern". Perkenankan saya menunjukkan kenyataan luar biasa itu.

POKOK-POKOK ETIKA PASCA-TRADISIONAL

Dengan etika pasca-tradisional dimaksud keyakinan-keyakinan etika politik yang semakin diakui di seluruh dunia, yang tidak lagi hanya berdasarkan budaya-budaya atau tradisi tertentu, melainkan berdasarkan keyakinan etis universal bahwa segenap orang wajib dihormati dan dilindungi dalam martabatnya sebagai manusia. Dapat dicatat bahwa kesadaran itu tumbuh melawan ancaman dua kekuatan modernitas paling dahsyat, yaitu ***negara modern berdaulat*** yang menganggap berhak untuk memutuskan segala masalah sesuai dengan kepentingannya tanpa perlu menghiraukan kemanusiaan, dan ***perekonomian kapitalis-neoliberal*** yang hanya mengenal satu hukum saja, hukum

pasar di mana yang menang maju terus dan yang kalah terlindas dan dibiarkan hancur.

Yang mencolok adalah bahwa empat dari lima sila Pancasila mengungkapkan dan menjamin empat keyakinan etis paling dasar yang sekarang diakui resmi oleh umat manusia - a. l. dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan oleh *Persatuan Bangsa-Bangsa* pada tanggal 10 Desember 1948.

Sila pertama Pancasila jelas memuat hak asasi paling dasar, yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal mana sekaligus membawa kewajiban untuk menghormati kemajemukan keyakinan agama dan relijius yang terdapat dalam masyarakat, jadi kewajiban berat untuk menjamin toleransi beragama.

Sila kedua mengungkapkan harkat kemanusiaan universal yang terungkap dalam jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan dalam penolakan prinsipil terhadap penyelesaian suatu konflik dengan cara kekerasan.

Sila keempat sudah jelas mengungkapkan keyakinan modernitas sangat mendasar akan hak rakyat untuk sendiri menentukan siapa yang memimpinnya dan ke mana ia mau dipimpin, d. l. k. keyakinan akan demokrasi.

Sila kelima secara eksplisit mengungkapkan keyakinan bahwa umat manusia terikat oleh solidaritas sebagai kewa-

jiban untuk tidak mengizinkan sebagian warganya tertinggal dalam kemiskinan, penderitaan dan keterlantaran, jadi bahwa pewujudan keadilan sosial harus menjadi tujuan pertama suatu perpolitikan yang beradab.

Sedangkan *sila ke-3* yang mengangkat tekad bangsa Indonesia untuk bersatu mencerminkan kenyataan bahwa dunia pasca-tradisional ditata dalam *nation-state*, jadi tidak berdasarkan kesukuan, tradisi feodal atau ideologi. Negara kebangsaan berarti bahwa itu "negara kita", bukan "negara mereka", "negara kaum bangsawan", bukan sekedar organisasi administratif.

Bisa dikatakan: Dengan mendasarkan Indonesia pada Pancasila para *founding fathers* menyatakan tekad mereka bahwa Indonesia di satu pihak hanya bisa bersatu apabila setia pada nilai-nilai kemanusiaan yang sudah sejak ratusan tahun mereka hayati, di lain pihak bahwa mereka menghendaki suatu Indonesia yang menjadi negara bermartabat yang semodern-modern.

KESIMPULAN KECIL

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Pancasila adalah konsensus bangsa Indonesia untuk saling mengakui dalam kekhasan, dengan mendasarkan diri pada lima keyakinan etis yang berakar dalam tradisi Nusantara, tetapi se-

kaligus mewujudkan keyakinan-keyakinan akan martabat manusia yang paling modern.■

